

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Gambaran Umum SKPD.....	1	
B. Tugas dan Fungsi.....	1	
C. Sumber Daya Organisasi .....	2	
D. Isu Stategis dan Permasalahan yang dihadapi.....	4	
E. Sistematika Penulisan.....	5	
BAB. II PERENCANAAN KINERJA		
A.Strategi dan Kebijakan.....	7	
B. Perjanjian Kinerja .....	9	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Akuntabilitas Kinerja.....	11	
B. Analisis Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait perncapaian yang ada di PK.....	12	
C. Pengungkapan Renstra yang belum dapat diukur ditahun 2016.....	13	
BAB IV. PENUTUP.....		21
A. Kesimpulan.....	21	
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III Sasaran.....	22	
C. Langkah-langkah yang akan dilakukan tahun berikutnya.....	23	
D. Pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja Baru yang sesuai dengan renstra.....	23	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Keadaan Pegawai per Desember.....	3
Tabel 2.1 Strategi Kebijakan.....	7
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja dan Target.....	9
Tabel 3.1 Capaian Kinerja berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM.....	11
Provinsi Kalimantan Utara.....	12
Tabel 3.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian Yang ada di PK.....	13
Tabel 3.3 Indikator yang tidak sesuai dengan Target.....	14
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi.....	15
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2016-2017.....	16
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra.....	17
Tabel 3.7 Analisa Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan.....	20
Tabel 4.1 Analisis Hambatan.....	22
Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya.....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
-------------------------------------	---

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 19 Maret 2018  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



  
Drs. HARTONO, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196105071985031014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum SKPD**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara.

### **B. Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Tugas**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **C. Sumberdaya Organisasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (Empat) Kepala Bidang seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



#### **D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi**

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

##### **a. Permasalahan bidang Perindustrian**

- Ketatnya tingkat persaingan pasar
- Tingginya cost Produksi
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional
- Masih rendahnya kompetensi pelaku IKM
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

##### **b. Permasalahan bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
  - Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor
  - Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah
  - Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kaltara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional
  - Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen
  - Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan
-



- Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik

### **c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi
- Meningkatnya koperasi tidak aktif
- Masih rendahnya kompetensi pelaku UKM dan UKM
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Manajerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi
- Sulitnya pemasaran produk UKM

Selain permasalahan yang terdapat di bidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang

## **E. Sistematika Penulisan**

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan mencakup : Gambaran Umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Bab ini mencakup Perencanaan Kinerja mencakup : Strategi dan Kebijakan Perjanjian Kinerja.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

---

Bab ini mencakup : Akuntabilitas kinerja, capaian-capaian di perjanjian Kinerja, analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di perjanjian kinerja, pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2016.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan apapun kegagalan pernyataan kinerja;

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini mencakup : Kesimpulan, hasil analisis berupa hambatan dari bab III sasaran, langkah-langkah yang dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan, pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra;

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjalar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

*Table 2.1.Strategi dan Kebijakan*

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Manajemen dan sistem pelayanan yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan sarana dan Prasarana pendukung 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Peningkatan industri yang berdaya saing tinggi	1. Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing 2. Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar 3. Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal 4. Meningkatkan sarana penunjang industri

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri	Meningkatnya perdagangan lokal yang optimal	Efisiensi perdagangan dalam negeri dan Peningkatan tertib perdagangan.	1. Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal
			Peningkatan Pertumbuhan Pelaku Ekspor	1. Penyediaan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 2. Membentuk Asosiasi Eksortir 3. Mengembangkan Kluster Produk Ekspor 4. Membangun Promosi Perdagangan Internasional 5. Membangun Hubungan Kerja sama dengan Negara lain 6. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	pembinaan dan pengawasan aktivitas perdagangan	2. Peningkatan pengawasan barang beredar
4	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Pengembangan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM yang berdaya saing tinggi.	1. Meningkatkan Kapasitas kompetensi pelaku Koperasi dan UKM 2. Melaksanakan Sosialisasi tentang perkoperasian dan UKM 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan 4. Menyelenggarakan Promosi Produk UKM dan UKM 5. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Ir. Irianto Lambrie, M.M sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada tahun anggaran 2017 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

*Table 2.2 Perjanian Kinerja dan target*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	70%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	1. Nilai Produksi IKM 2. Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	800 M 30%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Persentase UKM Produktif 2. Persentase Koperasi Sehat	19% 18%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja

##### 1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan
2. Meningkatnya Nilai produksi IKM
3. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri
4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
5. Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi
6. Persentase UKM Produktif
7. Persentase Koperasi Produktif

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pencapaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	Persentase	70%	73%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Nilai Produksi IKM	Rupiah	800 M	800M
		Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	Persentase	30%	15%

3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	2%	6,87%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Persentase	40%	39,22%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	Persentase	19%	31%
		Persentase Koperasi Sehat	Persentase	18%	78%

## B. Analisis Hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK

Bagian ini akan menguraikan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK, dengan melakukan analisa terhadap permasalahan – permasalahan yang dapat menghambat pencapaian, kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana Perjanjian Kinerja 2017 antara Kepala Daerah dan Kepala OPD, dan hambatan serta upaya yang dilakukan terkait penapaian Perjanjian Kinerja terangkum dalam table berikut :

**Tabel 3.2**  
**Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK**

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan	Masih Terdapat Pegawai Dinas Perindustrian yang belum ditempatkan sesuai jabatannya dan terdapat beberapa kegiatan yang	Telah melakukan pendataan Pegawai-pegawai untuk mengetahui jabatan yang bersangkutan dan telah dibuat SOP dalam pelaksanaan kegiatan

	Efisien	belum memiliki SOP dalam pelaksanaanya.	administrasi umum, keuangan dan perencanaan setra kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal rekomendasi izin dan pemberian angka pengenal Impor bagi pelaku usaha.
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualanya	Dialkukannya sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor	Dilakukan Sosialisasi kepada pelaku eskpor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Dilakukan Pengawasan Barang beredar dan Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melindungi hak-hak konsumen.
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	Telah dilakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM

### C. Pengungkapan Renstra Yang Belum Dapat Diukur Di Tahun 2016

Dalam Pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2016, terdapat beberapa indikator program dan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak memiliki relevansi, antara indikator dan satuan yang terdapat dalam Program maupun Kegiatan yang terdapat dalam renstra 2016 antara lain :

**Tabel 3.3 Indikator yang tidak sesuai dengan target**

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
Jumlah surat yang terkirim	1	Tahun
Jasa Komunikasi dan sumberdaya air dan listrik yang terpakai	1	Tahun
Jumlah pegawai non PNS yang bertambah dan terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan daerah	1	Tahun



Banyaknya jumlah ATK yang tersedia	1	Tahun
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	1	Tahun
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk SKPD	1	Tahun
Tersedianya peralatan rumah tangga untuk SKPD	1	Tahun
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan SKPD	1	Tahun
Tersedianya Makan minum Dinas dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD	1	Tahun
Banyaknya jumlah perjalanan dinas luar provinsi yang dilakukan	1	Tahun
Banyaknya jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	1	Tahun
Tersedianya Pengadaan Mebeleur kantor untuk SKPD	1	Tahun
Rumah/Gedung Kantor yang disewa dan dipakai	1	Tahun
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang berjalan	1	Tahun
Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional yang berjalan	1	Tahun
Banyaknya jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1	Tahun
Banyaknya Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang berjalan	1	Tahun
banyaknya jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan	1	Tahun

## 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2017 dan dapat dilihat pula perbandingan antara Target yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai antara lain adalah;

**Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

10	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pencapaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	Persentase	70%	73%

2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Nilai Produksi IKM	Rupiah	800 M	800 M
		Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	Persentase	30%	15%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	2%	6,87%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Persentase	40%	39,22%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	Persentase	19%	31%
		Persentase Koperasi Sehat	Persentase	18%	78%

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam realisasi serta capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah perbedaan dari target sasaran dan indikatornya sehingga menyebabkan perbedaan dalam realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2016 dan 2017 hal ini dikarenakan telah dilakukan revisi terhadap Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM, Maka dari itu tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis dan indikator capaian.

**Tabel 3.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2016-2017**

No	Sasaran Strategis Tahun 2016	Indikator Tahun 2016	Sasaran Strategis Tahun 2017	Indikator Strategis Tahun 2017
1	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisiensi	Prosentase Kegiatan yang menggunakan SOP	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan Tingkat
		Prosentase Aparatur yang ditempatkan sesuai ANJAB dan ABK		
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara	Prosentase Produk Industri Rumah Tangga yang memenuhi SNI	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Nilai Produksi IKM
		Prosesntase Jenis Produk Yang Tidak Layak Jual yang Beredar dipasaran		Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri
		Prosentase Koperasi yang melaksanakan RAT		
3	Prosentase Pertumbuhan Sektor Indagkop dan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara	Prosentase Pertumbuhan Sektor Industri	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi
		Prosentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan		
		Prosentase Pertumbuhan Sektor Koperasi		
		Prosentase Pertumbuhan Sektor UMKM	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif
				Persentase Koperasi Sehat

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara realialisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra**

10	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Pencapaian Target 2017	Target Renstra 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	Persentase	70%	73%	85%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Nilai Produksi IKM	Rupiah	800 M	800 M	1 T
		Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	Persentase	30%	15%	40%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	2%	6,87	2,5%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Persentase	40%	39,22%	25%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	Persentase	19%	31 %	30%
		Persentase Koperasi Sehat	Persentase	18%	78%	

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat standar nasional pada urusan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka ditemui beberapa Penyebab Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan ditahun 2017 antara lain sebagai berikut :

Keberhasilan :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM dapat melakukan kegiatan pendampingan kepada Koperasi guna meningkatkan kemampuan dari pada koperasi itu sendiri dan memberikan pelatihan dalam kemampuan membuat, keterampilan otomotif serta pelatihan keterampilan salon untuk membantu pelaku UKM lebih berdaya saing, maka dengan itu akan mendukung tercapainya peningkatan koperasi dan UKM yang sehat.
  - b. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Industri melakukan pelatihan Kepada Pelaku IKM untuk menambah kemampuan kepada pelaku IKM, agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan dapat membantu pelaku IKM dalam menambah nilai produksi dan dengan meningkatnya produksi IKM akan menambah nilai tambah industri itu sendiri.
  - c. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan dalam negeri dapat melaksanakan Kegiatan pengawasan Subsidi Ongkos Angkut kedaerah perbatasan Kalimantan utara, Pasar Murah, dan pengawasan peredaran barang, pengawasan Sistem ongkos angkut tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran pengiriman barang pokok kebutuhan warga Kalimantan utara yang ada diperbatasan dan kegiatan pasar murah dilaksanakan untuk membantu masyarakat Kalimantan utara menghadapi hari perayaan keagamaan seperti hari raya idul fitri dan natal, pengawasan peredaran barang dilakukan guna terjaminnya ketersediaan barang dan melindungi konsumen dari pedagang yang menjual barang tidak layak pakai atau konsumsi, dengan itu akan.dengan dilakukanya kegiatan tersebut terutama
-

pengawasan barang yang dimana menjamin ketersediaan barang diwilayah provinsi Kalimantan Utara akan meningkatkan daya beli diwilayah Kalimantan utara dan dapat menunjang peningkatan PDRB sektor perdagangan di Kalimantan Utara.

- d. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri melakukan Promosi Produk Lokal Kalimantan Utara Kepada Pasar Internasional dengan dikenalnya produk-produk pelaku usaha di Kalimantan utara akan meningkatkan nilai jual produk Kalimantan utara di pasar internasional, yang mana akan menambah pendapatan dari pelaku itu sendiri serta secara tidak langsung meningkatkan nilai ekspor non migas di Kalimantan utara, dan dapat mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan.

Kegagalan :

- a. Masih didapatnya pelaku IKM yang belum dapat memaksimalkan pengolahan Produk industri dari hulu hingga ke hilir dimana pengembang dari inovasi akan produk yang dihasilkan Dinas Perindagkop dan UKM terkendala dengan alokasi dana yang terbatas dimana seharusnya dapat dilakukan pelatihan tentang inovasi teknologi terhadap pelaku IKM, dengan demikian kurang mendukung peningkatan nilai tambah sektor industri.

Solusi :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM telah merencanakan dalam tahun anggaran 2018 akan membuat kegiatan pelatihan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dalam membuat sebuah produk, yang dimana nanti dapat meningkatkan kualitas produk IKM dan dapat menambah nilai tambah industri di Kalimantan utara.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sampai dengan akhir Desember tahun 2017 Dinas Perindagkop dan UKM memiliki jumlah pegawai 39 orang. SDM aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut belum sesuai dengan kebutuhan, hal ini terlihat bahwa 12,8 % (5) orang berpendidikan S2, selanjutnya 69,23 % (27) orang SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 7,69 % (3) orang kemudian dan 10,25 % (4) orang berpendidikan SLTA.

Dalam efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang ada dinas perindagkop menempatkan pegawai dengan beban kerja yang cukup merata walaupun masih didapati beberapa jabatan yang belum sesuai dengan jabatannya.

Pada Tahun anggaran 2017 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Menerima Pagu anggaran sebesar Rp. 11.000.000.000,-, dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran pada bulan Oktober 2017 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi 15.555.296.557,-

### **Belanja Langsung :**

#### **a. Sekretariat**

Alokasi anggaran Rp. 4.342.176.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.921.880.028,- atau sebesar 90,32% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp 420.295.972,-

#### **b. Perindustrian**

Alokasi anggaran Rp. 2,626,674,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.555,514,310,- atau sebesar 97,29% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 71,159,690,-

#### **c. Perdagangan Dalam Negeri**

Alokasi anggaran Rp. 3,975,250,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,738,950,719,- Atau Sebesar 94% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 236,299,281,-

**d. Perdagangan Luar Negeri**

Alokasi anggaran Rp. 957,300,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 477,489,544 ,- atau sebesar % dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 479,810,456,-

**e. Koperasi dan UKM**

Alokasi anggaran Rp. 3.653.896.557,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2,680,107,378,- atau sebesar 73 % dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 973,789,239,- .

**7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2017, Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas perindagkop bertujuan untuk menunjang dari pada pencapaian perjanjian kinerja Kepala OPD seperti pada sajian tabel berikut;

**Tabel 3.7 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2017)		Sasaran Strategis PK 2017	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target	Keterangan
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.581.726.000</b>	<b>3.345.424.409</b>	<b>Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan</b>	70%	73%	Dalam pelaksanaan kegiatan rutin administrasi OPD mendukung dalam pencapaian efektifitas dan manajemen pelayanan dengan terlaksananya kegiatan rutin administrasi perkantoran yang baik dalam perencanaan dan pemanfaatan keuangan akan berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.300.000	9.910.000					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	66.000.000	58.964.500					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.225.900.000	1.171.229.438					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	170.041.406	168.699.850					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.500.000	38.483.800					
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	104.000.000	71.691.351					
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	46.435.492	22.288.200					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12.800.000	12.799.652					



	Perundang - Undangan							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	91.431.692	70.644.100					
	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.173.917.410	1.093.768.500					
	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di dalam Daerah	630.400.000	626.945.018					
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>549.150.000,00</b>	<b>467.959.450</b>	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	70%	73%	Pada Pelaksanaan Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan di dukung 3 kegiatan bertujuan untuk mendukung terlaksananya manajemen pelayanan melalui ketersediaan kantor, dan kendaraan operasional Dinas
	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	338.700.000	338.000.000					
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	3.000.000	2.625.000					
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	207.450.000	127.334.450					
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>211.300.000</b>	<b>108.496.169</b>	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	70%	73%	Dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, akan meningkatkan kemampuan dari ASN/ Aparatur dari Dinas Perindagkop dan UKM dimana akan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan berguna dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	211.300.000,0	108.496.169					
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>1,926,330,000</b>	<b>1.801.803.967</b>	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%	39,22%	Realisasi Program dan Kegiatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan 3 kegiatan mendukung upaya pencapaian dalam menekan peredaran barang yang tidak layak konsumsi
	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	569.490.000	559.896.868					
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan konsumen	585.000.000	520.012.325					
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	771.840.000	721.894.774					

5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil menengah	2.737.836.057	2.181.429.657		Persentase UKM Produktif	19%	31%	Pelaksanaan Program Pengembangan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mendukung untuk meningkatkan UKM yang produksi dan dengan adanya kegiatan pendampingan kepada koperasi melalui kegiatan pendampingan koperasi akan dapat menunjang pertumbuhan koperasi sehat dimana tugas dari pendampingan koperasi adalah memberikan bimbingan terhadap koperasi dan melaksanakan pelaporan dan manajemen keuangan koperasi
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2.737.836.057	2.181.429.657	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Persentase Koperasi Sehat	18%	78%	
6	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	2.626.674.000	2.555.514.310		Nilai Produksi IKM	800 M	800 M	Pada pelaksanaan Program dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan didukung oleh kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri memberikan pelatihan kepada Pelaku IKM untuk menambah kemampuan kepada pelaku IKM, agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan dapat membantu pelaku IKM dalam menambah nilai produksi dan dengan meningkatnya produksi IKM akan menambah nilai tambah industri.
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	2.626.674.000	2.555.514.310	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	30%	15%	
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	957.300.000		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan	2%	6,8%	Melalui Program peningkatan dan pengembangan ekspor dan

	Pembangunan Promosi perdagangan Internasional	957.300.000	477.489.544		terhadap PDRB			kegiatan pemabangunan promosi perdagangan internasional dapat dilaksanakan, Promosi Produk Lokal Kalimantan Utara Kepada Pasar Internasiona dengan dikenalnya produk-produk pelaku usaha dikalimantan utara akan meningkatkan nilai jual produk Kalimantan utara di pasar internasional, yang mana akan menambah pendapatan dari pelaku itu sendiri serta secara tidak langsung meningkatkan nilai ekspor non migas di Kalimantan utara, dan dapat mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan.
8	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.698.580.000	1.937.146.752					Pelaksanaan Program Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan didukung 2 kegiatan pelaksanaan, dapat terselenggaranya pengawasan pengawasan Produk beredar dikalimantan utara, pengawasan Sistem Ongkos Angkut (SIOA) keperbatasan dan Kegiatan pasar murah untuk mendukung ketersediaan barang pada hari raya besar.
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1.548.580.000	1.456.425.296					
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	350.340.000	337.996.456	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%	6,8%	
9	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	500.000.000	498.677.721	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Persentase UKM Produktif	19%	31%	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	500.000.000	498.677.721		Persentase Koperasi Sehat	18%	78%	Koperasi dengan didukung dengan kegiatan Monev dan Pelaporan dimaksudkann untuk dapat memberikan pengawasan dan evaluasi kepada koperasi- koperasi yang belum menuntaskan kewajibanya dalam berkoperasi, seperti sudah memenuhi aspek organisasi yang baik, aspek usaha yang baik, aspek keuangan yang baik, aspek sosial yang baik dan aspek SMD yang baik untuk dapat dikategorikan sebagai koperasi yang sehat
--	--	-------------	-------------	--	---------------------------------	-----	-----	---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2017 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala
-

permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota dalam salah satu upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.

#### **B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III Sasaran**

Hasil analisis hambatan yang disajikan pada Bab III akan disajikan kembali dalam tabel berikut :

***Tabel 4.1 Analisis Hambatan***

No	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3
1	Masih Terdapat Pegawai Dinas Perindustrian yang belum ditempatkan sesuai jabatannya dan terdapat beberapa kegiatan yang belum memiliki SOP dalam pelaksanaannya.	Telah melakukan pendataan Pegawai-pegawai untuk mengetahui jabatan yang bersangkutan dan telah dibuat SOP dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan perencanaan setra kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal rekomendasi izin dan pemberian angka pengenal Impor bagi pelaku usaha.
2	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualanya	Dialkukannya sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
3	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Dilakukan Sosialisasi kepada pelaku eskpor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional

4	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	Telah dilakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM
---	--	--

### C. Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk Mengatasi Hambatan yang terjadi maka akan dilakukan langkah-langkah berupa :

***Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya dilakukan tahun berikutnya***

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Masih Terdapat Pegawai Dinas Perindustrian yang belum ditempatkan sesuai jabatannya dan terdapat beberapa kegiatan yang belum memiliki SOP dalam pelaksanaannya.	Menempatkan pegawai sesuai dengan jabatannya dengan berpedoman kepada Dokumen ANJAB dan menjalankan SOP agar tertib administrasi dan membuat SOP untuk kegiatan administrasi atau teknis yang belum memiliki SOP
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualannya	Akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
3	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan	Akan dilakukan Sosialisasi kepada pelaku ekspor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	
4	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan usaha kecil sehat	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	Akan dilakukan dan diteruskan melakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM

#### **D. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra**

Dengan dilakukannya beberapa kali revisi yang diakomodir oleh bappeda maka Renstra Dinas Perindagkop dan UKM telah disesuaikan dan dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan renstra, dengan berpedoman dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengndalian dan Evaluasi, dengan itu pula dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 yang telah disesuaikan dengan renstra terbaru Dinas Perindagkop dan UKM dengan indikator dan target sasaran yang lebih relevan dan dapat diukur;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS PK 2018	INDIKATOR KINERJA PK 2018	TARGET PK 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kontribusi sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	843 Milyard



			2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%
2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2%
			2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor		2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	2%
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%
3	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan usaha kecil sehat	Persentase UKM Produktif		Persentase UKM Produktif	23%
			Persentase Koperasi Produktif		Persentase Koperasi Produktif	20%

Kepala Dinas,

Drs. Hartono, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196105071985031014

---

## **Ringkasan Eksekutif**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara

SDM aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut belum sesuai dengan kebutuhan, hal ini terlihat bahwa 12,8 % (5) orang berpendidikan S2, selanjutnya 69,23 % (27) orang SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 7,69 % (3) orang kemudian dan 10,25 % (4) orang berpendidikan SLTA.

### **A. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi**

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

#### **a. Permasalahan bidang Perindustrian**

- Ketatnya tingkat persaingan pasar
- Tingginya cost Produksi
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional
- Masih rendahnya kompetensi pelaku IKM
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

## **b. Permasalahan bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
- Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor
- Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah
- Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kaltara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen
- Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan
- Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik

## **c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi
- Meningkatnya koperasi tidak aktif
- Masih rendahnya kompetensi pelaku UKM dan UKM
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Manajerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi
- Sulitnya pemasaran produk UKM

Selain permasalahan yang terdapat di bidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Ir. Irianto Lambrie, M.M sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada tahun anggaran 2017 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

**Table Perjanian Kinerja dan target**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	70%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	1. Nilai Produksi IKM 2. Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	800 M 30%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Persentase UKM Produktif 2. Persentase Koperasi Sehat	19% 18%

## B. Akuntabilitas Kinerja

### 1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan
2. Meningkatnya Nilai produksi IKM
3. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri
4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
5. Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi
6. Persentase UKM Produktif
7. Persentase Koperasi Produktif

*Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2017*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pencapaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	Persentase	70%	73%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Nilai Produksi IKM	Rupiah	800 M	800M
		Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	Persentase	30%	15%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan	Persentase	2%	6,87

		terhadap PDRB			
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Persentase	40%	39,22%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	Persentase	19%	31%
		Persentase Koperasi Sehat	Persentase	18%	78%

### C. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal

31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2017 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota dalam salah satu upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.



			2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%
2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2%
			2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor		2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	2%
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%
3	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan usaha kecil sehat	Persentase UKM Produktif		Persentase UKM Produktif	23%
			Persentase Koperasi Produktif		Persentase Koperasi Produktif	20%

Kepala Dinas,

  
Drs. Hartono, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196105071985031014